



PERILAKU KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK NEGARA DEMOKRASI DAN NON DEMOKRASI

Mustofa

*Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia
mustofa@uny.ac.id*

Abstrak: Perilaku Kepatuhan Membayar Pajak Negara Demokrasi dan Non Demokrasi. Pajak merupakan pungutan wajib dengan imbalan tak langsung. Penerimaan pajak disesuaikan dengan kepatuhan pajak individu suatu negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengetahui korelasi perilaku kepatuhan pajak dengan sistem pemerintahan negara (demokrasi dan non demokrasi). Kelompok negara demokrasi terdiri dari Indonesia, Singapura, dan Amerika Serikat. Kelompok negara non demokrasi terdiri dari China, Rusia, dan Vietnam. Data yang digunakan adalah data WVS Wave 7. Data dianalisis menggunakan analisis tabulasi silang untuk mengetahui korelasi kepatuhan pajak dengan variabel lainnya. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa warga negara dengan sistem pemerintahan demokrasi memiliki kecenderungan perilaku yang berbeda. Indonesia memiliki kecenderungan yang tidak patuh pajak sedangkan Amerika Serikat memiliki kecenderungan patuh pajak. Negara dengan sistem pemerintahan non demokrasi juga menemukan hasil yang tidak konsisten. Kepercayaan pada pemerintah berkaitan kuat dengan kecenderungan kepatuhan pajak warga negara.

Kata kunci: pajak; kepatuhan pajak; negara demokrasi; negara non demokrasi

Abstract: Compliance Behavior in Paying Taxes in Democratic and Non-Democratic Countries. Tax is a mandatory levy with indirect rewards. Tax revenue is adjusted to the individual tax compliance of a country. This study aims to identify and determine the correlation of tax compliance behavior with the state government system (democratic and non-democratic). The group of democratic countries consists of Indonesia, Singapore, and the United States. The group of non-democratic countries consists of China, Russia, and Vietnam. The data used is WVS Wave 7 data. The data were analyzed using cross tabulation analysis to determine the correlation of tax compliance with other variables. The results of this study conclude that citizens with democratic government systems have different behavioral tendencies. Indonesia has a tendency to not comply with taxes while the United States has a tendency to comply with taxes. Countries with non-democratic government systems also find inconsistent results. Trust in the government is strongly related to the tendency of citizens' tax compliance.

Keyword: tax; tax compliance; democracy country; non-democratic country

History & License of Article Publication:

Received: 02/02/2022

Revision: 15/07/2022

Published: 31/08/2022

DOI: <https://doi.org/10.21831/efisiensi.v19i2.53578>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Pajak dapat secara formal didefinisikan sebagai "pengambilan uang wajib oleh otoritas publik untuk tujuan publik" (Gaisbauer et al., 2013). Pajak juga dapat didefinisikan sebagai pungutan wajib yang tidak menerima imbalan secara langsung (Nobes & James, 1997). Pajak memiliki tujuan meningkatkan pendapatan untuk penyediaan barang publik. Menurut Frecknall-Hughes (2014) pajak memiliki peranan dalam redistribusi pendapatan dan kekayaan, mempromosikan kesejahteraan sosial dan ekonomi, stabilitas ekonomi, dan harmonisasi global.

Wajib pajak orang pribadi perlu menyadari kewajiban perpajakannya untuk memenuhi tanggung jawab kewarganegaraannya. Kesadaran wajib pajak diperlukan untuk meningkatkan penerimaan pajak. Kesadaran individu dibangun berdasarkan keyakinan terencana (Ajzen, 1991). Kesadaran wajib pajak erat kaitannya dengan kewajiban membayar pajak tepat waktu dan dalam jumlah yang tepat. Kesadaran wajib pajak didukung oleh aspek psikologis individu yang melakukan tindakan tertentu (Kan et al., 2020).

Terdapat banyak permasalahan yang erat kaitannya dengan pelaksanaan pemungutan pajak di Indonesia. Faktanya di Indonesia, undang-undang perpajakan saat ini mengharuskan kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak secara sukarela dan berkesinambungan dalam rangka mendukung pembangunan negara (Rahayu, 2013). Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, maka penerimaan pajak akan meningkat dan berlaku sebaliknya (Saeroji, 2019). Di Indonesia, kepatuhan pajak masih rendah. *Tax ratio* atau perbandingan jumlah penerimaan pajak dengan produk domestik bruto adalah buktinya. Pemerintah prihatin dengan kepatuhan pajak karena target pemungutan pajak meningkat setiap tahun. Penggelapan pajak masih menjadi masalah utama di negara kita. Pada kenyataannya, masalah kepatuhan pajak bukanlah masalah baru dan hampir ada di setiap negara.

Kepatuhan pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor eksternal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah; kerumitan sistem pembayaran pajak (Devos, 2012; Forest & Sheffrin, 2002; Westat, 1980); kondisi finansial wajib pajak (Ahmad et al., 2007; Bloomquist, n.d.; Harinurdin, 2009; Mustikasari, 2007; Slemrod, 1989); dan konsep keadilan sistem perpajakan (Carnes et al., 1995; Siahaan, 2012; B Torgler et al., 2007). Sedangkan faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kepercayaan individu pada pemungut pajak (Gangl et al., 2012; Kirchler et al., 2011; Wideman et al., 2013; Wintrobe & Gerxhani, 2001).

Tabel 1. Penelitian-Penelitian Kepatuhan Pajak

Peneliti/Tahun	Tujuan/Metode	Hasil
Torgler (2005)	Tujuan untuk mengetahui pengaruh sistem demokrasi terhadap kepatuhan pajak di Switzerland. Data ISSP 1998. Metode Ordered Probit.	Sistem demokrasi berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak.
Pavlos (2016)	Tujuan untuk mengetahui pengaruh sistem demokrasi terhadap kepatuhan pajak di 74 negara. Data World Bank World Development Indicator. Metode Two Stage Least Square	Sistem demokrasi berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak.
Mutascu (2011)	Tujuan untuk mengetahui pengaruh demokrasi pada kepatuhan pajak. Data World Bank 2011. Metode Ordinary Least Square.	Sistem demokrasi dan sistem otokrasi memiliki kepatuhan pajak yang tinggi.
Strielkowski & Čábelková (2015)	Tujuan untuk menganalisis pengaruh budaya dan agama pada kepatuhan pajak di Republik Ceko. Data World Values Survey. Metode Ordered Logit.	Agama dan kebanggaan nasional berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Kepercayaan pada lembaga pemerintah dan sikap terhadap pemerintah tidak terkait dengan kepatuhan pajak.
Torgler (2003)	Tujuan untuk menganalisis kemungkinan dan keterbatasan aspek theoretical-game untuk menganalisis penghindaran pajak. Data World Values Survey. Metode Ordered Probit.	Kepercayaan pada pemerintah, kebanggaan, dan religiusitas memiliki pengaruh positif yang sistematis terhadap moral pajak. Efek ini cenderung bertahan bahkan setelah mengontrol usia, pendapatan, pendidikan, jenis kelamin, status perkawinan, status pekerjaan.
Daniel & Wong (2008)	Untuk lebih memahami masalah kepatuhan dan etika dalam perpajakan. Metode studi literatur.	Keyakinan etis dapat menjadi sarana yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan tingkat kepatuhan pajak lebih tinggi ketika wajib pajak memiliki keyakinan moral yang lebih kuat.
Alm et al. (1992)	Untuk menguji peran yang dimainkan oleh kelebihan dari probabilitas rendah dan pengakuan atas layanan pemerintah dalam keputusan kepatuhan pajak individu. Data primer mahasiswa Universitas Colorado. Metode Experiment.	Kepatuhan tidak terjadi hanya karena individu percaya bahwa penghindaran itu salah dan individu membayar pajak karena mereka menghargai barang publik yang pajak mereka.
Johns & Slemrod (2010)	Untuk menilai konsekuensi distribusi dari ketidakpatuhan pajak penghasilan dalam pajak penghasilan federal AS. Data National Research Program Individual Income Tax Reporting Compliance Study 2001. Metode Estimasi Detection Controlled.	Misinformasi penghasilan sebenarnya meningkat seiring dengan bertambahnya penghasilan individu.

Kirchler (2007) berpendapat bahwa ada dua pengaruh potensial terhadap kepatuhan, yaitu iklim ketidakpercayaan terhadap pemerintah atau iklim kepercayaan terhadap pemerintah. Ketika publik memiliki kepercayaan pada pemerintah maka kepatuhan akan terjadi secara alami. Sikap wajib pajak mengenai tanggung jawab pemerintah dalam membelanjakan penerimaan pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepercayaan kepada pemerintah. Ketepatan penatausahaan penerimaan pajak dan penggunaannya dalam penyediaan barang publik oleh pemerintah ditunjukkan oleh penelitian Kogler et al. (2013) dan Nicolaidis (2014). Hal ini menunjukkan bahwa bagaimana pemerintah membelanjakan pendapatan pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (Scholz & Lubell, 1998). Tingkat kredibilitas pemerintah dapat diukur dari keberhasilan pemerintah dalam menjalankan program pembangunan. Wajib pajak pada dasarnya dapat melihat atau merasakan keberhasilan pembangunan.

Dari segi sistem pemerintahan, demokrasi merupakan sistem yang paling dianggap ideal untuk membangun kepercayaan masyarakat. Demokrasi memberikan pemahaman bahwa kekuasaan sebuah negara berasal dari kekuatan rakyatnya (Noviati, 2016). Kołczyńska (2021) menemukan bahwa demokrasi memiliki dampak positif terhadap kepercayaan dan begitu pula sebaliknya. Kepatuhan pajak akan lebih tinggi pada negara dengan sistem demokrasi (Gould & Baker, 2002). Dengan menggunakan sistem pemerintahan demokrasi maka masyarakat dapat berperan langsung dalam pemerintahan melalui mekanisme yang telah dilakukan. Individu juga menghargai barang-barang publik yang disediakan oleh pemerintah yang dibayar oleh pajak mereka (Alm et al., 1992).

Masih sedikit literatur yang membahas dampak sistem pemerintah yang digunakan terhadap kepatuhan pajak. Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perilaku kepatuhan pajak di negara demokrasi dan non demokrasi. Apakah warga negara untuk masing-masing kelompok negara memiliki perilaku kepatuhan pajak yang konsisten? Apakah kepercayaan kepada pemerintah berhubungan erat dengan perilaku kepatuhan pajak?

METODE

Sumber data penelitian menggunakan survey World Values Survey (WVS) Wave 7. Unit analisis dari penelitian ini adalah tingkat individu. Penelitian ini menggunakan data panel dengan jumlah sampel 11.479. Responden berasal dari 6 negara yang dibagi menjadi 2 kelompok, yakni negara demokrasi (Indonesia, Singapura, dan Amerika Serikat) dan negara non demokrasi (China, Rusia, dan Vietnam). Analisis yang digunakan pada penelitian

ini adalah analisis tabulasi silang untuk mengetahui korelasi variabel kepatuhan pajak dengan variabel independen lainnya. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah religiositas, status perkawinan, penghasilan rumah tangga, pendidikan, pendidikan ayah, pendidikan ibu, preferensi kesetaraan, dan kepercayaan pada pemerintah.

Untuk mengukur variabel kepatuhan pajak, penelitian ini menggunakan pertanyaan terkait dengan pendapat responden mengenai kepatuhan pajak/pelanggaran pajak dari jawaban kuesioner WVS Q180. Nilai dari kepatuhan pajak merupakan 0 dan 1. Nilai 0 untuk responden yang cenderung “selalu bisa dibenarkan” atau tidak membayar pajak. Nilai 1 untuk responden yang cenderung “tidak bisa dibenarkan” atau patuh membayar pajak.

Variabel religiositas individu dalam penelitian ini diukur dari persepsi pribadi individu mengenai ketaatan beragama dari jawaban kuesioner WVS 173. Nilai dari religiositas adalah rentang nilai 1-3. Nilai 1 untuk individu yang taat beragama, nilai 2 untuk individu yang tidak taat beragama, dan nilai 3 untuk individu ateis. Variabel status perkawinan dalam penelitian ini merupakan status perkawinan individu diperoleh dari jawaban kuesioner WVS Q273. Nilai dari status perkawinan merupakan nilai 0 dan 1. Nilai 0 untuk tidak kawin dan nilai 1 untuk kawin. Variabel penghasilan rumah tangga dalam penelitian ini diukur dari persepsi individu mengenai tingkat pendapatan rumah tangga yang diperoleh dari jawaban kuesioner WVS Q288. Nilai dari penghasilan merupakan rentang nilai 1-5. Nilai 1 untuk penghasilan rumah tangga terendah dan nilai 5 untuk penghasilan rumah tangga tertinggi atau dapat memilih nilai di antara rentang 1-5.

Variabel pendidikan merupakan jenjang terakhir pendidikan yang diselesaikan oleh individu diperoleh dari jawaban kuesioner WVS Q275. Jenjang pendidikan dibagi menjadi lima, yakni tidak sekolah/PAUD, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Variabel pendidikan ibu merupakan jenjang terakhir pendidikan yang diselesaikan oleh ibu individu diperoleh dari jawaban kuesioner WVS Q277. Jenjang pendidikan ibu dibagi menjadi lima, yakni tidak sekolah/PAUD, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Variabel pendidikan ayah merupakan jenjang terakhir pendidikan yang diselesaikan oleh ayah individu diperoleh dari jawaban kuesioner WVS Q278. Jenjang pendidikan ibu dibagi menjadi lima, yakni tidak sekolah/PAUD, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi.

Variabel preferensi kesetaraan pendapatan dalam penelitian ini diukur dari persepsi individu mengenai kesetaraan pendapatan yang diperoleh dari jawaban kuesioner WVS Q106. Nilai dari preferensi kesetaraan pendapatan merupakan rentang nilai 1-10. Nilai 1 untuk kecenderungan “Individu yang mau berusaha harusnya diberikan insentif yang lebih besar” dan nilai 10 untuk kecenderungan “Pendapatan seharusnya dibuat sama” atau dapat

memilih angka di antara rentang 1-10. Variabel kepercayaan pada pemerintah dalam penelitian ini diukur dari kepercayaan individu terhadap pemerintah diperoleh dari jawaban kuesioner WVS Q71. Nilai dari kepercayaan pada pemerintah adalah 0 dan 1. Nilai 0 apabila individu tidak percaya pada pemerintah dan nilai 1 apabila individu percaya pada pemerintah. Variabel status perkawinan dalam penelitian ini diambil dari jawaban kuesioner WVS 273. Nilai 0 untuk individu tidak kawin dan nilai 1 untuk individu yang kawin.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Tabel 2 menunjukkan kepatuhan berdasarkan asal negara individu. Asal negara individu dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok negara demokrasi dan kelompok negara non demokrasi. Kelompok negara demokrasi terdiri dari Indonesia, Singapura, dan Amerika Serikat. Kelompok negara non demokrasi terdiri dari China, Rusia, dan Vietnam. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa warga negara dengan sistem pemerintahan demokrasi memiliki kecenderungan perilaku yang berbeda. Indonesia memiliki kecenderungan yang tidak patuh pajak sedangkan Amerika Serikat memiliki kecenderungan patuh pajak. Negara dengan sistem pemerintahan non demokrasi juga menemukan hasil yang tidak konsisten. China sebagai negara non demokrasi memiliki kecenderungan perilaku patuh pajak sedangkan Rusia memiliki kecenderungan perilaku tidak patuh pajak.

Tabel 2. Analisis Tabulasi Silang Kepatuhan Pajak antar Negara

Variabel	Kepatuhan Pajak	
	Tidak Patuh	Patuh
Negara		
Indonesia	35,90	24,19
Singapura	4,04	15,66
Amerika Serikat	12,72	19,88
China	6,11	23,24
Rusia	30,77	9,33
Vietnam	10,45	7,71

Sumber: WVS Wave 7 yang telah diolah

Tabel 3 menunjukkan bahwa individu yang religius cenderung tidak patuh membayar pajak. Individu yang tidak religius dan ateis cenderung patuh membayar pajak. Berdasarkan status perkawinan, individu yang tidak kawin cenderung tidak patuh pajak dan individu yang kawin cenderung patuh pajak. Berdasarkan tingkat penghasilan rumah tangga, individu dengan penghasilan rumah tangga tingkat 1 dan tingkat 5 memiliki kecenderungan untuk

tidak patuh pajak. Individu dengan penghasilan rumah tangga tingkat 2, tingkat 3, dan tingkat 4 memiliki kecenderungan memiliki kepatuhan pajak. Dari hasil tersebut berarti individu yang memiliki tingkat penghasilan terendah dan tertinggi cenderung tidak patuh membayar pajak.

Tabel 3. Analisis Tabulasi Silang Kepatuhan Pajak antar Religiositas

Variabel	Kepatuhan Pajak	
	Tidak Patuh	Patuh
Religiositas		
Religius	71,10	55,93
Tidak Religius	21,01	31,29
Ateis	7,89	12,79
Status Perkawinan		
Tidak Kawin	42,90	33,24
Kawin	57,10	66,76
Penghasilan Rumah Tangga		
Tingkat 1 (terendah)	22,68	15,32
Tingkat 2	21,30	25,55
Tingkat 3	36,09	41,81
Tingkat 4	15,19	15,56
Tingkat 5 (tertinggi)	4,73	1,77

Sumber: WVS Wave 7 yang telah diolah

Tabel 4. Analisis Tabulasi Silang Kepatuhan Pajak antar Pendidikan

Variabel	Kepatuhan Pajak	
	Tidak Patuh	Patuh
Pendidikan		
Tidak Sekolah/PAUD	5,82	4,11
SD	15,68	10,91
SMP	15,38	15,75
SMA	19,63	25,59
Perguruan Tinggi	43,49	43,64
Pendidikan Ayah		
Tidak Sekolah/PAUD	16,17	23,82
SD	25,35	23,03
SMP	14,60	15,02
SMA	15,29	17,42
Perguruan Tinggi	28,60	20,71
Pendidikan Ibu		
Tidak Sekolah/PAUD	17,75	24,20
SD	24,56	23,57
SMP	13,02	14,63
SMA	15,68	18,61
Perguruan Tinggi	28,99	18,98

Sumber: WVS Wave 7 yang telah diolah

Tabel 4 menunjukkan bahwa individu yang tidak sekolah/PAUD dan SD cenderung tidak patuh pajak. Individu dengan pendidikan SMP, SMA, dan perguruan tinggi cenderung memiliki kepatuhan pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa individu dengan pendidikan lebih tinggi cenderung memiliki kepatuhan pajak. Berdasarkan pendidikan ayah, individu dengan pendidikan ayah tidak sekolah/PAUD, SMP, dan SMA cenderung patuh pajak. Individu dengan pendidikan ayah SD dan perguruan tinggi cenderung tidak patuh pajak. Berdasarkan pendidikan ibu, individu dengan pendidikan ibu tidak sekolah/PAUD, SMP, dan SMA cenderung patuh pajak. Individu dengan pendidikan ibu SD dan perguruan tinggi cenderung tidak patuh pajak.

Tabel 5. Analisis Tabulasi Silang Kepatuhan Pajak antar Kesetaraan Pendapatan

Variabel	Kepatuhan Pajak	
	Tidak Patuh	Patuh
Preferensi Kesetaraan Pendapatan		
Kesenjangan	62,52	61,50
Kesetaraan	37,48	38,50
Kepercayaan Pada Pemerintah		
Percaya	66,47	73,05
Tidak Percaya	33,53	26,95

Sumber: WVS Wave 7 yang telah diolah

Tabel 5 menunjukkan bahwa individu yang memiliki preferensi kesenjangan pendapatan cenderung tidak patuh pajak. Individu yang memiliki preferensi kesetaraan pendapatan cenderung patuh pajak. Berdasarkan kepercayaan pada pemerintah, individu yang percaya pemerintah cenderung memiliki kepatuhan pajak. Individu yang tidak percaya pemerintah cenderung tidak patuh pajak.

Pembahasan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini menemukan bahwa terdapat perbedaan dengan hasil penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya menemukan bahwa sistem pemerintah demokrasi mendukung adanya kepatuhan pajak dari individu (Mutascu, 2011; Pavlos, 2016; Benno Torgler, 2005). Alm et al. (1992) dalam penelitiannya menemukan bahwa individu membayar pajak karena menghargai barang yang dibayar atas pajak mereka. Penelitian ini menemukan bahwa sistem demokrasi tidak konsisten mendukung kepatuhan pajak warga suatu negara. Penelitian ini menunjukkan bahwa warga negara Indonesia yang memiliki sistem pemerintahan demokratis memiliki kecenderungan tidak patuh membayar pajak. Hal

ini berbeda dengan warga negara Amerika Serikat yang cenderung taat membayar pajak. China yang menganut sistem pemerintahan otokrasi yang sejalan dengan penelitian Mutascu (2011) yang menemukan bahwa negara dengan sistem otokrasi yang kuat memiliki warga negara yang cenderung untuk mematuhi pajak. Berbeda dengan warga negara Rusia yang cenderung berperilaku tidak taat membayar pajak.

Nilai-nilai agama diharapkan dapat mencegah perilaku negatif individu. Oleh karena itu, religiositas diharapkan akan mendorong kepatuhan sukarela. Dengan kata lain, terdapat keyakinan bahwa wajib pajak dengan kecenderungan religius yang tinggi akan segera memenuhi kewajiban perpajakannya dan akan memiliki sikap yang lebih positif tentang pengelolaan pajak (Eiya et al., 2016). Hasil penelitian sebelumnya menemukan bahwa religiositas mendorong kepatuhan pajak individu (Ross & McGee, 2014; Stack & Kposowa, 2006; Benno Torgler, 2003). Penelitian ini menemukan hasil berbeda yaitu individu yang religius cenderung melanggar pajak, sedangkan individu yang tidak religius dan ateis cenderung patuh pajak.

Hasil penelitian Aregbesola et al. (2020) menemukan bahwa individu tidak kawin memiliki kepatuhan pajak lebih tinggi. Hasil penelitian Torgler (2003) dan Yalama & Gumus (2013) menemukan bahwa status perkawinan tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap perilaku kepatuhan pajak. Penelitian ini menemukan kecenderungan individu status kawin lebih patuh pajak dibandingkan individu tidak kawin.

Penelitian Alm et al. (1992) dan Johns & Slemrod (2010) menemukan bahwa orang berpenghasilan rendah cenderung menghindari pajak dan orang berpenghasilan tinggi cenderung patuh pajak. Penelitian ini menemukan bahwa individu dengan penghasilan rumah tangga yang ekstrem (terendah dan tertinggi) cenderung tidak patuh pajak. Hasil penelitian ini tidak membentuk suatu polarisasi tertentu sejalan dengan Daniel & Wong (2008) yang tidak menemukan hubungan signifikan antara pendapatan dan kepatuhan pajak.

Penelitian Benzoni (2016) menemukan bahwa semakin tinggi pendidikan individu, semakin tinggi tingkat kepatuhan pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan tidak adanya polarisasi dari pendidikan pada kepatuhan pajak, baik pendidikan individu, pendidikan ayah, maupun pendidikan ibu. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Torgler (2003) yang menemukan bahwa tidak ada hubungan signifikan pendidikan dengan kepatuhan pajak individu. Semakin tinggi pendidikan individu tidak menjamin adanya kepatuhan pajak karena kepatuhan pajak lebih berkaitan dengan moral dibandingkan pemahaman logis.

Individu yang memiliki preferensi kesetaraan pendapatan tinggi memiliki mendukung kebijakan redistribusi (Ackert et al., 2007; Schildberg-Hörisch, 2010; Tyrann & Sausgruber,

2006). Kebijakan redistribusi suatu negara menggunakan sistematika pajak dan subsidi untuk menyalurkan kekayaan. Penelitian ini menemukan bahwa individu yang memiliki preferensi kesetaraan pendapatan yang tinggi merupakan individu yang patuh pajak, meskipun selisih perbedaan hanya tipis (lihat tabel 5). Individu yang patuh pajak yakin bahwa uang yang mereka keluarkan akan mendukung kesetaraan pendapatan.

Pajak adalah alat untuk pembangunan masyarakat dan juga sarana untuk mendistribusikan hasil pembangunan (Oladiran, 2009). Pajak akan dikembalikan kepada dalam bentuk manfaat yang berbeda, seperti fasilitas publik. Namun, adanya citra buruk dari pemerintah dapat mengurungkan niat individu untuk membayar pajak, misalnya korupsi dan penyelewengan dana. Penelitian Torgler (2003) dan Uslaner (2008) menemukan bahwa individu yang percaya dengan pemerintah negara akan patuh pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang mana individu yang percaya pada pemerintah akan cenderung patuh pajak (lihat tabel 5).

KESIMPULAN

Perilaku kepatuhan pajak dapat dianalisis dari kelompok demokrasi dan kelompok non demokrasi. Kelompok negara demokrasi terdiri dari Indonesia, Singapura, dan Amerika. Kelompok negara non demokrasi terdiri dari China, Rusia, dan Vietnam. Hasil penelitian ini menyimpulkan negara dengan sistem pemerintahan demokrasi tidak menemukan hasil yang konsisten. Indonesia merupakan negara demokrasi memiliki kecenderungan rakyat yang tidak patuh pajak. Negara dengan sistem pemerintahan non demokrasi juga menemukan hasil yang tidak konsisten, China sebagai negara non demokrasi tetapi memiliki tingkat kepatuhan pajak individu yang tinggi.

Kepercayaan pada pemerintah merupakan salah satu faktor krusial dalam kepatuhan pajak. Individu akan cenderung patuh pajak apabila percaya pada pemerintah. Negara dengan sistem pemerintahan demokrasi relatif mampu membangun kepercayaan pada pemerintah yang tinggi. Implikasi dalam ini adalah pemerintah seharusnya membangun kepercayaan publik guna mewujudkan kepatuhan pajak masyarakatnya. Penelitian ini masih terbatas pada analisis tabulasi silang sehingga hanya mampu mengungkap perilaku kepatuhan berdasarkan kecenderungan individu. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan analisis yang lebih komprehensif supaya dapat mengungkap faktor-faktor lain dalam perilaku kepatuhan pajak individu.

DAFTAR PUSTAKA

- Ackert, L. F., Martinez-Vazquez, J., & Rider, M. (2007). Social references and tax policy design: Some experimental evidence. *Economic Inquiry*, 45(3), 487–501. <https://doi.org/10.1111/j.1465-7295.2007.00048.x>
- Ahmad, N., Noor, J. M., & Saleh, J. M. (2007). Fraudulent Financial Reporting and Companies Characteristics: Evidence From Tax Audit in Malaysia. *Jurnal Pengurusan*, 22, 27–45.
- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior And Human Decision Provsesses*, 50, 179–211.
- Alm, J., McClelland, G. H., & Schulze, W. D. (1992). Why Do People Pay Their Taxes ? *Journal of Public Economics*, 48, 21–38. <http://www.redalyc.org/pdf/3396/339630262002.pdf>
- Aregbesola, O. ., Owosekun, A. ., & Salawu, R. . (2020). *Marital Status and Educational Background as Determinants of Tax Compliance in Nigeria. IV(Viii)*, 777–783.
- Benzoni, M. (2016). *Factors Shaping Tax Compliance: A micro and macro research*. 30–75.
- Bloomquist, K. M. (n.d.). Tax Evasion, Income Inequality and Opportunity Costs of Compliance. *96th Annual Conference of the National Tax Association*.
- Carnes, G., Englebrecht, A., & Ted, D. (1995). An Investigation of the Effect of Detection Risk Perception, Penalty Sanctions, and Income Visibility on Tax Compliance. *The Journal of The American Taxation*, 17(1), 26.
- Daniel, D., & Wong, B. (2008). Issues on compliance and ethics in taxation: what do we know? *Journal of Financial Crime*, 15(4), 369–382. <https://doi.org/10.1108/13590790810907218>
- Devos, K. (2012). The Impact of Tax Professionals Upon the Compliance Behavior of Australian Individual Taxpayers. *Revenue Law Journal*, 22(1), 1–26.
- Eiya, O., Ilaboya, O. J., & Okoye, A. F. (2016). Religiosity and Tax Compliance: Empirical Evidence From Nigeria. *Igbinedion University Journal of Accounting*, 1, 27–41.
- Forest, A., & Sheffrin, S. M. (2002). National Tax Journal. *Complexity and Compliance. An Empirical Investigation*, LV(1), 75–88.
- Frecknall-Hughes, J. (2014). The theory, principles and management of taxation: An introduction. In *The Theory, Principles and Management of Taxation: An Introduction*. <https://doi.org/10.4324/9780203797914>
- Gaisbauer, H. P., Schweiger, G., & Sedmak, C. (2013). Ethical Obligations of Wealthy People: Progressive Taxation and the Financial Crisis. *Ethics and Social Welfare*, 7(2), 141–154. <https://doi.org/10.1080/17496535.2013.779003>
- Gangl, K., Hofmann, E., & Erich, K. (2012). *Tax Authorities Interaction with Taxpayers: Compliance by Power and Trust* (No. 6).

- Gould, A. C., & Baker, P. J. (2002). Democracy and taxation. *Annual Review of Political Science*, 5, 87–110. <https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.5.100201.101909>
- Harinurdin, E. (2009). Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Organisasi*, 16(2), 96–104.
- Johns, A., & Slemrod, J. (2010). The Distribution Of Income Tax Noncompliance. *National Tax Journal*, 63(3), 397–418.
- Kan, M. P. H., Fabrigar, L. R., & Fishbein, M. (2020). Encyclopedia of Personality and Individual Differences. In *Encyclopedia of Personality and Individual Differences* (pp. 1–8).
- Kirchler, E. (2007). *The Economic Psychology of Tax Behaviour*. Cambridge university Press.
- Kirchler, E., Hoelzi, E., & Wahl, I. (2011). Voluntary Versus Enforced Tax Compliance: The Slippery Slope Framework. *Journal of Economic Psychology*, 29, 210–225.
- Kogler, C., Batrancea, L., Nichita, A., Pantya, J., Belianin, A., & Kirchler, E. (2013). Trust and power as determinants of tax compliance: Testing the assumptions of the slippery slope framework in Austria, Hungary, Romania and Russia. *Journal of Economic Psychology*, 34, 169–180. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2012.09.010>
- Kołczyńska, M. (2021). *Political trust as a cause and consequence of democracy: Longitudinal analysis of European data*. 1–34.
- Mustikasari, E. (2007). Kajian Empiris Tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Perusahaan Industri Pengolahan di Surabaya. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, X(21), 99–120.
- Mutascu, M. (2011). Taxation and democracy. *Journal of Economic Policy Reform*, 14(4), 343–348. <https://doi.org/10.1080/17487870.2011.635037>
- Nicolaides, P. (2014). *Tax Compliance Social Norms and Institutional Quality: An Evolutionary Theory of Public Good Provision* (Vol. 7565). <https://doi.org/10.2778/38621>
- Nobes, & James. (1997). *The Economics of Taxation, Principle, Policy and Practice*. Prentice Hall.
- Noviati, C. E. (2016). Demokrasi dan Sistem Pemerintahan. *Jurnal Konstitusi*, 10(2), 333. <https://doi.org/10.31078/jk1027>
- Oladiran, A. (2009). Resources taxation as a tool for development. *Thomson Reuters (Legal) Limited and Contributors*.
- Pavlos, B. (2016). Democracy and taxation. *Mpra*, 35423, Paper No. 83457, posted 17. <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/57475/%0Ahttps://mpra.ub.uni-muenchen.de/83457/>
- Rahayu, S. K. (2013). *Perpajakan Indonesia, Konsep dan Formal*. Graha Ilmu.

- Ross, A. M., & McGee, R. W. (2014). Attitudes toward Tax Evasion: A Demographic Study of Switzerland. *Asian Journal of Law and Economics*, 2(3). <https://doi.org/10.2202/2154-4611.1028>
- Saeroji, O. (2019). Menakar kadar kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Perpajakan*.
- Schildberg-Hörisch, H. (2010). Is the veil of ignorance only a concept about risk? An experiment. *Journal of Public Economics*, 94(11–12), 1062–1066. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2010.06.021>
- Scholz, J. T., & Lubell, M. (1998). Adaptive Political Attitude: Duty, Trust and Fear as Monitors of Tax Policy. *American Journal of Political Science*, 42(3), 903–920.
- Siahaan, F. . (2012). The Influence of Tax Fairness and Communication on Voluntary Compliance: Trust as an Intervening Variable. *International Journal of Business and Social Science*, 3(21), 34–56.
- Slemrod, J. (1989). Complexity, Compliance Cost, and Tax Evasion. *An Agenda for Compliance Research*, 2, 44–67.
- Stack, S., & Kposowa, A. (2006). The effect of religiosity on tax fraud acceptability: A cross-national analysis. *Journal for the Scientific Study of Religion*, 45(3), 325–351. <https://doi.org/10.1111/j.1468-5906.2006.00310.x>
- Strielkowski, W., & Čábelková, I. (2015). Religion, culture, and tax evasion: Evidence from the Czech Republic. *Religions*, 6(2), 657–669. <https://doi.org/10.3390/rel6020657>
- Torgler, B, Schaffner, M., & Macintyre, A. (2007). *Tax Compliance, Tax Morale, and Governance Quality*.
- Torgler, Benno. (2003). To evade taxes or not evade: That is the question. *Journal of Socio-Economics*, 32(3), 283–302. [https://doi.org/10.1016/S1053-5357\(03\)00040-4](https://doi.org/10.1016/S1053-5357(03)00040-4)
- Torgler, Benno. (2005). Tax morale and direct democracy. *European Journal of Political Economy*, 21(2), 525–531. <https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2004.08.002>
- Tyran, J. R., & Sausgruber, R. (2006). A little fairness may induce a lot of redistribution in democracy. *European Economic Review*, 50(2), 469–485. <https://doi.org/10.1016/j.eurocorev.2004.09.014>
- Uslaner, E. M. (2008). Corruption, Inequality, and the Rule of Law. In *News.Ge*. Cambridge University Press.
- Westat. (1980). Individual Income Tax Compliance Factors Study: Qualitative Research Results. *Prepared for the Internal Revenue Service, Contract n*.
- Wideman, T. H., Sullivan, M. J. L., Inada, S., McIntyre, D., Kumagai, M., Yahagi, N., Turner, J. R., Upton, J., Burns, R. J., Rothman, A. J., Michie, S., Johnston, M., Nakashima, M., Vedhara, K., Dawe, K., Wong, C., Gellman, M. D., Brimmer, D., Zielinski-Gutierrez, E., ... Woltz, P. (2013). Brief Multidimensional Measure of Religiousness/Spirituality (BMMRS). *Encyclopedia of Behavioral Medicine*, 267–269. https://doi.org/10.1007/978-1-4419-1005-9_1577

Wintrobe, R., & Gerxhani, K. (2001). Tax Evasion and Trust: A Comparative Analysis. *The Accounting Review*, 76(5), 343–359.

Yalama, G. O., & Gumus, E. (2013). Determinants of Tax Evasion Behavior : Empirical Evidence from Survey Data. *International Business and Management*, 6(2), 15–23. <https://doi.org/10.3968/j.ibm.1923842820130602.1085>

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ucapkan terima kasih kepada World Values Survey yang telah menyediakan data WVS Wave 7 yang digunakan dalam penelitian ini.